II. FORMAT TELAAHAN STAF PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

TELAAHAN STAF
Nomor: R/TS/ /I/OTL.1.1./2018/Satker

tentang

(PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA/POLRES/POLSEK/KAWASAN*)

I. PERMASALAHAN : (memuat rumusan singkat permasalahan, apabila permasalahanya kompleks, agar disebutkan ruang lingkupnya).

II. PRAANGGAPAN : (memuat praanggapan yang logis tentang permasalahan, praanggapan digunakan apabila tidak ada fakta. Nomor ini boleh tidak dipergunakan).

III. FAKTA-FAKTA : (memuat pernyataan/fakta yang berpengaruh terhadap permasalahan atau pemecahan).

IV. DISKUSI : (memuat analisis semua faktor yang mempengaruhi termasuk keuntungan dan kerugian dari kemungkinan pemecahan permasalahan, dengan cara yang jelas dan singkat, perinciannya dimuat dalam lampiran).

V. KESIMPULAN : (menyajikan kesimpulan yang ditarik dari analisis, serta semua pemecahan yang mungkin).

VI. SARAN : (sesuai dengan kesimpulan dan merupakan tindakan staf lengkap. Apabila disarankan suatu kebijaksanaan atau pelaksanaan yang akan ditandatangani oleh pimpinan, naskah tersebut harus dilampirkan pada telaahan).

Dikeluarkan : Jakarta
pada tanggal: tanggal bulan tahun

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

NAMA LENGKAP
PANGKAT

Tembusan:

1. .....
2. .....

III. FORMAT NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

NASKAH AKADEMIK
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode penulisan, landasan hukum serta sistematika.

B. BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri, sehingga memiliki dasar dan legitimasi secara akademis

C. BAB III TINJAUAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN EMPIRIS

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan secara historis, sosiologis, yuridis dan empiris sebagai acuan dan pertimbangan dalam pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.

D. BAB IV KONDISI KESATUAN SAAT INI

Pada bab ini menguraikan tentang analisa secara umum dan khusus terhadap kesatuan kewilayahan Polri yang akan dibentuk ataupun yang ditingkatkan/diturunkan tipenya.

E. BAB V PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan tentang aspek-aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, sosial budaya, keamanan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kesatuan kewilayahan Polri yang akan dibentuk ataupun ditingkatkan/diturunkan tipenya.

F. BAB VI ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DISARANKAN

Pada bab ini menguraikan tentang alternatif kebijakan secara umum maupun kebijakan khusus.

G. BAB VII PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

Jakarta, 2018
KEPALA KEPOLISIAN .....

.....
.....

*) melampirkan dokumentasi, Sertifikat tanah serta dokumen-dokumen

IV. FORMULIR STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

FORMULIR STUDI KELAYAKAN
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE
KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KET
1	2	3	4
1.	Sejauh mana diperlukannya pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan	Sangat perlu/ perlu/kurang perlu	coret yang tidak sesuai
2.	Latar belakang/pertimbangan/ alasan pengusulan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan.	a. ..... b. .....dst.	
3.	Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan atau peningkatan Kesatuan Kewilayahan	a. ..... b. .....dst.	
4.	Data awal:		
	Berapa persen luas wilayah perairan?	Luas wilayah perairan: ..... %	
	Berapa Luas wilayah kesatuan?	Luas wilayah: ..... km^2	
	Dimana letak kesatuan kewilayahan	a. Ibukota Negara b. Ibukota Provinsi c. Kota d. Kabupaten e. Kecamatan	
	Apakah wilayah kesatuan berbatasan dengan negara lain?	a. berbatasan darat dan laut b. berbatasan darat c. berbatasan laut d. tidak berbatasan	
	Berapa jumlah penduduk?	..... jiwa	
	Berapa Kepadatan Penduduk?	..... jiwa/km^2	
	Apa mayoritas hasil Komoditas yang dominan di wilayah kesatuan?	a. pertambangan b. perkebunan c. pertanian d. perikanan e. peternakan f. lain-lain	
	Bagaimana faham radikal di wilayah kesatuan?	a. ada b. terindikasi c. tidak ditemukan	
	Berapa jumlah pemilih dalam pemilihan umum?	..... pemilih	
	Berapa persen pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun?	..... %	
	Berapa persen jumlah penduduk miskin?	..... %	

Berapa .....

	Berapa produk domestik bruto di wilayah kesatuan?	Rp. .....,-	
	Berapa persen tingkat inflasi di wilayah kesatuan?	..... %	
	Berapa jumlah sekolah di wilayah kesatuan (SD, SLTP, SLTA, PT Sederajat)?	a. SD: ..... b. SLTP: ..... c. SLTA: ..... d. PT:	
	Berapa jumlah Ormas/LSM?	..... Ormas/LSM	
	Berapa jumlah suku bangsa yang ada diwilayah kesatuan?	..... suku bangsa	
	Berapa jumlah tindak pidana per tahun?	..... kasus	
	Berapa persen penyelesaian tindak pidana per tahun?	..... %	
	Berapa jumlah kejadian kontijensi (konflik sosial, bencana alam, terorisme) per tahun?	..... kejadian	
	Berapa jumlah kejadian laka lantas pertahun?	..... kejadian	
	Berapa persen penyelesaian perkara laka lantas per tahun?	..... %	
	Berapa jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pertahun?	..... jiwa	
	Berapa jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun?	..... jiwa	
	Berapa jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pertahun?	..... jiwa	
	Berapa jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pertahun?	Rp.	
	Berapa jumlah pelanggaran lalu lintas pertahun?	..... kasus	
	Berapa jumlah lokasi rawan macet di wilayah kesatuan?	..... Lokasi	
	Berapa jumlah pelayanan SIM per tahun?	.....	
	Berapa jumlah pelayanan BPKB per tahun?	.....	
	Berapa jumlah pelayanan STNK per tahun?	.....	
	Berapa jumlah pelayanan TNKB per tahun?	.....	
	Berapa jumlah pelayanan SKCK per tahun?	.....	
	Berapa jumlah potensi konflik?	.....	
	Berapa jumlah kegiatan pengamanan kegiatan masyarakat pertahun?	.....	
	Berapa jumlah pengamanan unjuk rasa pertahun?	.....	

Berapa .....

	Berapa jumlah obvitnas dan obvitda di wilayah kesatuan berdasarkan keputusan presiden/ kementerian/lembaga?	obvitnas: ..... obvitda:	
	Berapa jumlah obvit tertentu?	obvit tertentu:	
	Berapa jumlah inovasi pelayanan publik yang telah operasional minimal 1 tahun?	.....	
	Berapa nilai kualitas pelayanan publik di kesatuan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan?		
	Berapa nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik?		
	Berapa persen jumlah personel riil dibandingkan dengan DSP di kesatuan?	..... %	
	Berapa rasio jumlah personel Polri dengan penduduk?	1 : ..... orang	
	Berapa rasio jumlah Polri dengan luas wilayah?	1 : ..... km^2	
	Berapa nilai AKIP berdasarkan hasil penilaian fungsi pengawasan?	.....	
	Berapa nilai ITK berdasarkan hasil penilaian RBP?	.....	
	Berapakah jumlah regulasi, konvensi dan nota kesepahaman di kesatuan?	.....	
	Berapa persen pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana dibandingkan dengan standar kebutuhan miminal?	..... %	
	Berapa persen pemenuhan kebutuhan anggaran di kesatuan dibandingkan dengan kebutuhan ideal?	..... %	
5.	Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung usulan pembentukan/peningkatan kesatuan.	a. ..... b.	
6.	Apakah sudah tersedia bangunan untuk kantor sementara yang disiapkan oleh kesatuan/Pemerintah Daerah.	ada/belum	
7.	Jumlah personel dan sarana prasarana yang disiapkan untuk kesatuan yang dibentuk atau ditingkatkan: a. personel b. kantor c. Rumdin d. Materiil	 a. ..... orang b. 1 unit c. ..... KK d. ..... (jenis)	

8. Kendala ...

8.	Kendala/hambatan/permasalahan yang ada?	a. ..... b.	
9.	Sebutkan dampak negatif bila kesatuan kewilayahan tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. ..... b.	
10.	Adakah alternatif lainnya bila kesatuan tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. ..... b.	
11.	Saran/masukan.	a. ..... b.	

Dikeluarkan di: .....
pada tanggal : .....

KEPALA KEPOLISIAN .....,

.....
.....

CATATAN:

Daftar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dikaitkan dengan situasi dan kondisi wilayah.

V. FORMAT LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum:
   menguraikan secara umum tentang latar belakang, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai.

2. Maksud dan Tujuan:
   menguraikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka pembentukan maupun perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.

3. Dasar:
   Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan studi kelayakan dalam rangka pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.

4. Ruang Lingkup:
   Menguraikan tentang lingkup studi kelayakan yang dilaksanakan.

5. Tata Urut:
   Menguraikan tentang urutan penulisan laporan hasil studi kelayakan.

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN
   Menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil studi kelayakan.

C. HASIL YANG DICAPAI
   Menguraikan tentang hasil pelaksanaan studi kelayakan sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya pembentukan/peningkatan/penurunan tipe kesatuan kewilayahan guna pengambilan keputusan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
   Berisi uraian kesimpulan dari hasil studi kelayakan dan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

E. PENUTUP

Jakarta, 2018

KEPALA KEPOLISIAN .....

.....
.....

*) melampirkan dokumentasi, Sertifikat tanah serta dokumen-dokumen usulan yang diperlukan

VI. FORMAT LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA/CAMAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MENGENAI PEMBENTUKAN ATAU PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK

LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum: .....
2. Maksud dan Tujuan: .....
3. Dasar a. .....
   b. .....
4. Ruang Lingkup: .....
5. Tata Urut : .....

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

.....

.....

C. HASIL YANG DICAPAI

6. .....

D. KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan .....
8. Saran .....

E. PENUTUP ....

2

E. PENUTUP

9. .....

Jakarta, 2018
KEPALA KEPOLISIAN .....

.....
.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN